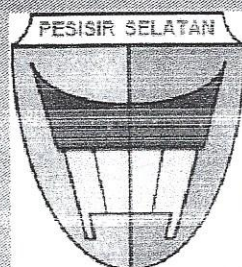


LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019



DINAS TANAMAN PANGAN , HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT maka Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 telah dapat disusun sebagaimana mestinya.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Akutansi Keuangan Berbasis AkruaI

Laporan keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja surplus/defisit dan pembiayaan serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akutansi/pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari pos-pos berupa Ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan serta koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif, rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan muka, kebijakan akutansi yang diterapkan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan SAP untuk diungkapkan.

*Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019*

Laporan ini juga sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2019 oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Disadari bahwa laporan ini mempunyai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu diharapkan kritik dan saran semua pihak sebagai perbaikan, baik sekarang maupun kedepannya

Painan , Januari 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP.19670826 199803 1 001

*Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Maksud dan Tujuan	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Sistematika Penulisan	3
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	5
2.1 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	9
BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	20
3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda	20
3.1.1 Pendapatan	20
3.1.2 Beban	20
3.1.3 Belanja	21
3.1.4 Aset	21
3.1.5 Kewajiban	22
3.1.6 Ekuitas Dana	22
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemda	23
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN	

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu *Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu*.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 4.700.000,- dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 104.800.000,00. Rendahnya realisasi ini disebabkan karena pada tahun 2019 PAD hanya diperoleh dari restribusi pemakaian rumah dinas oleh ASN sebanyak 7 unit, sedangkan PAD yang berasal dari perbanyakan benih padi pada Balai Benih Tanaman Pangan (BPTP) Padang Laban Kecamatan Ranah Pesisir sudah tidak ada lagi dipungut semenjak tahun 2018 hal ini disebabkan karena

kegiatan sudah dihentikan sesuai dengan surat Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2017.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 25.315.720.263,92 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 4.762.571.565,00 dan Aset Tetap sebesar Rp. 20.481.983.898,92 berupa tanah sebesar Rp. 1.605.276.614,00, peralatan dan mesin sebesar Rp. 8.126.359.055,42, gedung dan bangunan sebesar Rp. 10.914.168.407,98, jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 7.452.283.596,48, Aset tetap Lainnya (netto) sebesar Rp. 44.660.000,00, Konstruksi dalam pengerjaan Rp. 62.935.000,00, Akumulasi Penyusutan Rp. -7.724.198.774,95 dan aset lainnya sebesar Rp. 71.164.800,00,- Nilai Kewajiban sebesar Rp. 1.455.550.000,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 23.860.170.263,92,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 4.700.000,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 21.658.897.903,00,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 21.654.197.903,00,-

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan setiap bab berisikan sub bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Landasan Hukum

	1.3	Sistematika Penulisan
BAB II		IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	2.1	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	2.2	Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III		PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda
	3.1.1	Pendapatan
	3.1.2	Beban
	3.1.3	Belanja
	3.1.4	Aset
	3.1.5	Kewajiban
	3.1.6	Ekuitas Dana
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemda
BAB IV		Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan Pemda
BAB V		P E N U T U P

B A B II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN

2.1. Ikhtisar realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

No	PROGRAM/KEGIATAN	Belanja		
		Angaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	15.457.379.998	13.048.309.022	84,41
A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	937.635.313	865.156.369	92,27
1	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	135.000.000	98.484.009	72,95
	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000	98.484.009	72,95
	Belanja Modal	-	-	-
2	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	217.050.000	211.250.000	97,33
	Belanja Pegawai	217.050.000	211.250.000	97,33
3	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	128.750.000	128.122.100	99,51
	Belanja Pegawai	750.000	750.000	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	128.000.000	127.372.100	99,51
4	4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	28.069.700	25.040.000	89,21
	Belanja Barang dan Jasa	28.069.700	25.040.000	89,21
5	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.719.681	149.818.750	99,40
	Belanja Barang dan Jasa	150.719.681	149.818.750	99,40
6	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.692.232	36.665.510	87,94
	Belanja Barang dan Jasa	41.692.232	36.665.510	87,94
7	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.203.700	6.876.000	95,45
	Belanja Barang dan Jasa	7.203.700	6.876.000	95,45
8	8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.550.000	10.490.000	99,43
	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000	10.490.000	99,43
	Belanja Modal	-	-	-
9	9 Penyediaan Makanan dan Minuman	42.900.000	31.210.000	72,75
	Belanja Barang dan Jasa	42.900.000	31.210.000	72,75
10	10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	77.900.000	72.970.000	93,67
	Belanja Barang dan Jasa	77.900.000	72.970.000	93,67
11	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	97.800.000	94.230.000	96,35
	Belanja Barang dan Jasa	97.800.000	94.230.000	96,35
B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	976.155.500	933.428.092	95,62
12	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	528.536.000	527.936.000	99,89
	Belanja Modal	528.536.000	527.936.000	99,89
13	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	73.521.500	73.071.500	99,39
	Belanja Modal	73.521.500	73.071.500	99,39
14	3 Pengadaan Meubiler	38.750.000	34.200.000	88,26
	Belanja Modal	38.750.000	34.200.000	88,26
15	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	78.000.000	76.022.500	97,46
	Belanja Pegawai	52.000.000	52.000.000	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	18.097.500	90,48
	Belanja Modal	6.000.000	5.925.000	98,75
16	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	257.348.000	222.198.092	86,34
	Belanja Pegawai	42.000.000	42.000.000	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	215.348.000	180.198.092	83,68

C.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	110.400.000	110.287.000	99,90
17	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	110.400.000	110.287.000	99,90
	Belanja Barang dan Jasa	110.400.000	110.287.000	99,90
D.	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN, TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	1.150.455.600	894.032.585	77,71
18	1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	761.026.600	532.511.285	69,97
	Belanja Pegawai	4.200.000	3.300.000	78,57
	Belanja Barang dan Jasa	756.826.600	529.211.285	69,93
19	2 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	32.426.000	22.993.500	70,91
	Belanja Barang dan Jasa	32.426.000	22.993.500	70,91
20	3 Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI	235.400.500	234.694.850	99,70
	Belanja Pegawai	400.000	-	-
	Belanja Barang dan Jasa	235.000.500	234.694.850	99,87
21	4 Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	36.000.000	24.000.000	66,67
	Belanja Pegawai	36.000.000	24.000.000	66,67
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
22	5 Pengembangan Teknologi Budidaya Padi Organik	85.602.500	79.832.950	93,26
	Belanja Pegawai	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa	85.602.500	79.832.950	93,26
E.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	2.347.743.446	2.253.543.699	95,99
23	1 Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan	251.462.600	239.265.900	95,15
	Belanja Pegawai	800.000	300.000	37,50
	Belanja Barang dan Jasa	250.662.600	238.965.900	95,33
24	2 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	45.476.000	44.115.800	97,01
	Belanja Barang dan Jasa	45.476.000	44.115.800	97,01
25	3 Pengembangan Tanaman Hortikultura	92.312.600	89.339.650	96,78
	Belanja Pegawai	6.400.000	6.300.000	98,44
	Belanja Barang dan Jasa	85.912.600	83.039.650	96,66
26	4 Optimalisasi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat	74.225.900	64.117.906	86,38
	Belanja Pegawai	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa	74.225.900	64.117.906	86,38
27	5 Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit/OPT Tanaman Perkebunan	44.375.000	43.535.000	98,11
	Belanja Barang dan Jasa	44.375.000	43.535.000	98,11
28	6 Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	138.507.500	117.229.793	84,64
	Belanja Pegawai	16.900.000	16.800.000	99,41
	Belanja Barang dan Jasa	121.607.500	100.429.793	82,59
29	7 Pengendalian Hama Perkebunan	325.182.600	299.326.400	92,05
	Belanja Pegawai	18.400.000	18.300.000	99,46
	Belanja Barang dan Jasa	306.782.600	281.026.400	91,60
30	8 Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	149.217.300	148.423.850	99,47
	Belanja Pegawai	36.000.000	36.000.000	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	113.217.300	112.423.850	99,30
31	9 Penyusunan Data Base Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	604.884.400	601.903.350	99,51
	Belanja Pegawai	1.200.000	900.000	75,00
	Belanja Barang dan Jasa	603.684.400	601.003.350	99,56

32	10	Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian	149.109.164	138.684.500	93,01
		Belanja Pegawai	55.000.000	53.200.000	96,73
		Belanja Barang dan Jasa	94.109.164	85.484.500	90,84
33	11	Penangkaran Bibit Unggul Perkebunan	4.030.382	4.024.250	99,85
		Belanja Pegawai	-	-	-
		Belanja Barang dan Jasa	4.030.382	4.024.250	99,85
		Belanja Modal	-	-	-
34	12	Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian	267.112.500	265.848.550	99,53
		Belanja Pegawai	300.000	-	-
		Belanja Barang dan Jasa	266.812.500	265.848.550	99,64
35	13	Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida	39.737.500	36.360.350	91,50
		Belanja Pegawai	-	-	-
		Belanja Barang dan Jasa	39.737.500	36.360.350	91,50
36	14	Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	162.110.000	161.368.400	99,54
		Belanja Pegawai	30.000.000	29.500.000	98,33
		Belanja Barang dan Jasa	132.110.000	131.868.400	99,82
F.		PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN	519.044.400	509.697.157	98,20
37	1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	467.878.900	459.316.657	98,17
		Belanja Pegawai	78.600.000	78.190.000	99,48
		Belanja Barang dan Jasa	389.278.900	381.126.657	97,91
38	2	Penyusunan Program Penyuluh Pertanian/Perkebunan	51.165.500	50.380.500	98,47
		Belanja Barang dan Jasa	51.165.500	50.380.500	98,47
G.		PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PETANI	1.596.289.000	1.283.036.431	80,38
39	1	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (LKMA)	95.929.000	92.469.000	96,39
		Belanja Pegawai	44.400.000	44.400.000	100,00
		Belanja Barang dan Jasa	51.529.000	48.069.000	93,29
40	2	Fasilitasi Asuransi Usaha Tanaman Padi	38.830.400	36.964.666	95,20
		Belanja Pegawai	19.200.000	19.000.000	98,96
		Belanja Barang dan Jasa	19.630.400	17.964.666	91,51
41	3	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum	138.104.600	137.066.500	99,25
		Belanja Barang dan Jasa	138.104.600	137.066.500	99,25
42	4	LOAN IPDMIP	1.110.540.400	821.613.750	73,98
		Belanja Pegawai	207.900.000	207.900.000	100,00
		Belanja Barang dan Jasa	902.640.400	613.713.750	67,99
43	5	Penunjang LOAN IPDMIP	70.851.200	68.757.965	97,05
		Belanja Pegawai	18.000.000	18.000.000	100,00
		Belanja Barang dan Jasa	52.851.200	50.757.965	96,04
44	6	Forum Komunikasi Petani/Kontak Tani	142.033.400	126.164.550	88,83
		Belanja Barang dan Jasa	142.033.400	126.164.550	88,83
H.		PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN	343.908.748	331.319.956	96,34
45	1	Pengembangan Pasca Panen Tanaman Hortikultura	78.098.500	77.894.200	99,74
		Belanja Pegawai	24.000.000	24.000.000	100,00
		Belanja Barang dan Jasa	54.098.500	53.894.200	99,62
46	2	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produksi Perkebunan	45.864.442	41.951.250	91,47
		Belanja Pegawai	12.000.000	12.000.000	100,00
		Belanja Barang dan Jasa	33.864.442	29.951.250	88,44
47	3	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	10.560.000	8.079.300	76,51
		Belanja Pegawai	-	-	-
		Belanja Barang dan Jasa	10.560.000	8.079.300	76,51

46	2	Pengembangan Jaringan Pemasaran Produksi Perkebunan	45.864.442	41.951.250	91,47
		Belanja Pegawai	12.000.000	12.000.000	100,00
		Belanja Barang dan Jasa	33.864.442	29.951.250	88,44
47	3	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	10.560.000	8.079.300	76,51
		Belanja Pegawai	-	-	-
		Belanja Barang dan Jasa	10.560.000	8.079.300	76,51
48	4	Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan	144.185.806	142.978.956	99,16
		Belanja Pegawai	39.700.000	39.600.000	99,75
		Belanja Barang dan Jasa	104.485.806	103.378.956	98,94
49	5	Pengembangan Pasca Panen Tanaman Perkebunan	65.200.000	60.416.250	92,66
		Belanja Pegawai	6.000.000	6.000.000	100,00
		Belanja Barang dan Jasa	59.200.000	54.416.250	91,92
H.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNAN	7.475.747.991	5.867.807.733	78,49
50	1	Pengembangan Prasarana dan sarana pertanian (penunjang satker 08)	77.203.991	76.832.186	99,52
		Belanja Pegawai	48.750.000	48.750.000	100,00
		Belanja Barang dan Jasa	28.453.991	28.082.186	98,69
51	2	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	3.830.380.000	3.690.791.400	96,36
		Belanja Pegawai	128.975.000	120.475.000	93,41
		Belanja Barang dan Jasa	3.521.505.000	3.390.716.400	96,29
		Belanja Modal	179.900.000	179.600.000	99,83
52	3	DAK Bidang Pertanian dan Pendamping	2.017.814.000	2.011.841.254	99,70
		Belanja Pegawai	7.850.000	5.100.000	64,97
		Belanja Barang dan Jasa	1.408.414.000	1.405.595.470	99,80
		Belanja Modal	601.550.000	601.145.784	99,93
53	4	Penunjang DAK Bidang Pertanian	94.800.000	88.342.893	93,19
		Belanja Pegawai	44.550.000	41.550.000	93,27
		Belanja Barang dan Jasa	50.250.000	46.792.893	93,12
54	5	Pembukaan Jalan Pertanian Puncak Baling Koto Baru Kec. Bayang	94.800.000	-	-
		Belanja Barang dan Jasa	94.800.000	-	-
55	6	Pembuatan JUT Kenagarian Ngatau Gadang Limau-limau Kec.Bayang Utara	189.700.000	-	-
		Belanja Barang dan Jasa	189.700.000	-	-
56	7	Pembangunan Jalan Pertanian Ditan Nagari Muaro Aie Pancuang Tebal	94.800.000	-	-
		Kec. Bayang Utara			
		Belanja Barang dan Jasa	94.800.000	-	-
57	8	Pembangunan Jalan Pertanian Korong Nan Ampek Kec. Koto IX Tarusan	94.800.000	-	-
		Belanja Barang dan Jasa	94.800.000	-	-
58	9	Pembangunan Jalan Ruas Limau Manis Kulam Nagari Kambang-Ganting	180.200.000	-	-
		Kubang Nagari Kambang Utara Kec. Lengayang			
		Belanja Barang dan Jasa	180.200.000	-	-
59	10	Peningkatan Jalan Air Kulam Kec. Lengayang	94.800.000	-	-
		Belanja Barang dan Jasa	94.800.000	-	-
60	11	JUT Rawang Indah menuju Nagari Gurun Panjang Kampung Ambacang	189.700.000	-	-
		Kamba Nagari Asam Kamba Kec.Bayang			
		Belanja Barang dan Jasa	189.700.000	-	-
61	12	JUT Lumpur (Pengerasan-Gorong-gorong jembatan) Nagari Barung-barung	142.300.000	-	-
		belantai Kec. Koto IX Tarusan			
		Belanja Barang dan Jasa	142.300.000	-	-
62	13	Jalan Pertanian Lakitan Selatan Kec. Lengayang	189.700.000	-	-
		Belanja Barang dan Jasa	189.700.000	-	-
63	14	JUT Rimbo Data Korong Nan Ampek Kampung Sungai Lundang Kenagarian	184.750.000	-	-
		Kampung Baru Kec. Koto IX tarusan			
		Belanja Barang dan Jasa	184.750.000	-	-
		J U M L A H	15.457.379.998	13.048.309.022	84,41

2.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal Pencapaian Target kinerja ini memiliki hambatan dan kendala-kendala, yang diuraikan per kegiatan dibawah ini :

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 9 Program dan 63 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 15.457.379.998,00 dan Realisasi sebesar Rp.13.048.309.022,- atau sebesar 84,41 persen.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Pagu anggaran Program ini Rp. 937.635.313,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 13.048.309.022,00,- atau 92,27 %. Pada Program ini terdiri dari 12 Kegiatan Yaitu :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.135.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.484.009,- (72,95%), rendahnya realisasi kegiatan ini karena realisasi disesuaikan dengan tagihan.

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Administrasi Keuangan selama 12 bulan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 217.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 211.250.000,- atau 97,33% ,

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 128.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 128.122.100,- (97,33%) ,

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 28.069.700,- dengan realisasi sebesar

Rp. 25.040.000,- (89,21%), rendahnya reaslisasi keuangan dikarenakan realisasi disesuaikan dengan perbaikan yang dilakukan

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 150.719.681,- dengan realisasi sebesar Rp. 149.818.750,- (99,40%) ,

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 41.692.232,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.665.510,- (87,94%) ,

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 7.203.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.876.000,- (95,45%) ,

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan tentang teknis pertanian maupun non teknis pertanian dan tersedianya peraturan perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 10.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.490.000,- (99,43%) ,

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Makanan dan Minuman tamu dinas maupun makan minum rapat lengkap selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 42.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.210.000,- (72,75%) ,

j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Sasaran kegiatan ini adalah Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang dihadiri selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 77.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.970.000,- (93,67%) ,

k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Sasaran kegiatan ini adalah Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah yang dihadiri selama 12 bulan, Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 97.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.230.000,- (96,35%) ,

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini adalah pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sehingga memiliki umur ekonomis diatas rata-rata. Pagu anggaran Program ini Rp. 976.155.500,00 dengan realisasi anggaran Rp. 933.428.092,00,- atau 95,62 %. Program ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu:

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas untuk operasional petugas lapangan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 528.536.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 527.936.000,- atau 99,89 %

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor untuk menunjang kelancaran kegiatan diantaranya pembuatan papan struktur organisasi, papan nama jabatan, hardisk eksternal, printer, computer PC, dan laptop untuk pemetaan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 73.521.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.071.500,- atau 99,39 %

c. Pengadaan Meubiler

Sasaran Kegiatan ini adalah tersedianya meubiler yang mendukung sarana kerja aparatur Dinas Pertanian, berupa pengadaan meja setengah biro, kursi putar dan lemari arsip. Sehingga menambah nilai aset Dinas Pertanian.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 38.750.000,- dengan realisasi 34.200.000,- (88,26 %).

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya gedung kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yaitu berupa penggantian pintu gudang dan pembelian gorden ruang kepala dinas, Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 78.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 76.022.500,- atau 97,46 %.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 257.348.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 222.198.092,- atau 86,34%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan agar terlatihnya pegawai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam mengaplikasikan GIS untuk penentuan titik koordinat lahan dan kegiatan. Program ini hanya terdapat satu kegiatan yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 110.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 110.287.000,- atau 99,90% .

4. Program Peningkatan Penerapan, Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program ini bertujuan untuk penerapan teknologi pertanian oleh petani dan masyarakat Untuk mencapai tujuan program tersebut, ada lima kegiatan yang menunjang. Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.150.455.600,- dengan realisasi Rp. 894.032.585,- atau 77,71 % dengan kegiatan sebagai berikut ini:

a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Kegiatan bertujuan untuk pengadaan alat mesin pertanian untuk memudahkan petani dalam berusaha tani serta untuk menunjang tercapainya target produksi tahun 2019. Pagu anggaran sebesar Rp 761.026.600,- dengan realisasi keuangan Rp 532.511.285,- atau 69,97%. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan adanya pengadaan mesin bajak yang bersumber dari dana pokir yang dianggarkan pada anggaran perubahan yang tidak bias terealisasi, hal ini dikarenakan jangka waktu pengadaan yang terlalu pendek sehingga pihak penyedia tidak bersedia untuk melaksanakannya. Sarana dan prasarana yang diberikan adalah :

- 1). Pengadaan Hand Traktor Rotari sebanyak 1 unit
- 2) Pengadaan power thresher sebanyak 6 unit
- 3) Pengadaan Hand traktor 6,5 PK sebanyak 9 unit
- 4) Pengadaan Hydrotiler sebanyak 7 Unit.
- 5) Pengadaan Hand Sprayer sebanyak 43 unit
- 6) Pengadaan Cornsheller sebanyak 2 unit
- 7) Pengadaan Pompa Air sebanyak 3 unit

b. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Pagu anggaran sebesar Rp 32.426.000,- dengan realisasi keuangan Rp 22.993.500,- atau 70,91 %. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena pelaksanaan pelatihan pupuk organik yang semula direncanakan pesertanya dari beberapa kecamatan, namun dalam pelaksanaannya peserta hanya

difokuskan pada satu kecamatan saja, sehingga transport peserta menjadi bersisa.

c. Pengembangan Teknologi Budidaya Padi Sri

Pagu anggaran sebesar Rp. 235.400.500,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 234.694.850,- atau 99,70 persen. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan demplot budidaya padi dengan metode tanam padi System of Rice Intensification (SRI). Metode ini merupakan teknologi baru dalam budidaya padi sawah dengan beberapa keunggulan, diantaranya bisa menekan sarana produksi seperti bibit sehingga bisa menghemat biaya, hemat waktu dan produksi lebih tinggi.

d. Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 36.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- atau 66,67 %. Rendahnya realisasi ini dikarenakan belum jelasnya status alsintan yang ada di brigade padang laban, sehingga kegiatan pemeliharaan alsintan dibatalkan.

e. Pengembangan teknologi budidaya padi organik. Pagu anggaran sebesar Rp. 85.602.500,- dengan jumlah realisasi keuangan sebesar 79.832.950,- atau 93,26 persen. Sosialisasi dan Pendampingan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perikanan
Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pada masyarakat perikanan akan peluang-peluang modal usaha untuk menjalankan aktifitasnya para nelayan. Seperti Kredit Usaha Rakyat yang dapat diakses oleh para nelayan baik di BRI, BNI dan BPD. Dalam hal ini, para nelayan akan mendapat pendampingan dalam mengakses kredit tersebut oleh Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha (PPB MU) yang difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Persyaratan sesuai dengan aturan Bank masing-masing. Pada tahun 2018, hampir lebih kurang Rp.3.800.000.000 para pelaku usaha perikanan mendapatkan modal usaha melalui perbankan. Anggaran kegiatan sebesar Rp. 37.747.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.629.000,- atau 70,55 %.

5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian/perkebunan yang di topang dengan pengadopsian teknologi budidaya, teknologi pengendalian dan pemberantasan hama/penyakit tanaman baik tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan.

Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 2.347.743.446,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.253.543.699,- atau 95,99% . yang terdiri dari 14 kegiatan diantaranya

- a. Peningkatan bibit unggul perkebunan, kegiatan ini bertujuan untuk menunjang produksi perkebunan dengan cara pemberian bantuan bibit gambir dan kopi kepada kelompok tani, Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp .251.462.600,- dengan realisasi keuangan Rp. 239.265.900,- atau 95,15 %
- b. Pengembangan bibit unggul pertanian.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan melalui bantuan benih padi unggul bermutu varietas Batang Piaman. Anggaran untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 45.476.000,- dengan realisasi Rp. 44.115.800,- atau 97,00%.
- c. Pengembangan Tanaman Hortikultura.
Kegiatan ini bertujuan untuk memicu peningkatan produksi tanaman komoditi hortikultura melalui pemberian bantuan berupa bantuan bibit jeruk manis kepada kelompok tani, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 92.312.600,- realisasi keuangan sebesar Rp. 89.339.650,- atau 96,78%.
- d. Optimasi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat.
Pagu anggaran sebesar Rp. 74.225.900,- dengan realisasi anggaran Rp. 64.117.906,- atau 86,38%.
- e. Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit OPT Tanaman Perkebunan.
Kegiatan ini bertujuan melatihnya petani dalam mengenal dan mengendalikan hama tanaman perkebunan sesuai dengan jenis hama/penyakit serta gejala serangan yang ditimbulkan. Pagu Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 44.375.000,- dengan realisasi Rp. 43.535.000,- atau 98,11%.
- f. Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan
Tujuan dari kegiatan ini adalah melatihnya petani penangkar tanaman perkebunan serta tersalurnya bibit induk gambir kepada kelompok tani penangkar. Jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 138.507.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 117.229.793,- atau 84,64%.
- g. Pengendalian Hama Perkebunan
Kegiatan ini bertujuan berkurangnya hama yang menyerang tanaman perkebunan melalui gerakan pengendalian hama secara bersama-sama dan serentak. Pagu anggaran sebesar Rp. 325.182.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 299.326.400,- atau 92,05 %.
- h. Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kegiatan ini bertujuan agar terfasilitasinya kegiatan provinsi dan pusat yang di ada Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 149.217.300,- realisasi keuangan sebesar Rp. 148.423.850,- atau sebesar Rp. 99,47 %.

i. Penyusunan Data Base Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya data base lahan pertanian pangan berkelanjutan, pada tahun 2019 LP2B tersusun sebanyak 5 kecamatan diantaranya kecamatan Airpura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah IV Hulu Tapan dan Kecamatan Lunang, yang dalam penyusunan data base bekerjasama dengan Universitas. Andalas selanjutnya telah dilakukan pembahasan naskah akedemik Raperda LP2B. Pagu anggaran sebesar Rp. 604.884.400, realisasi keuangan sebesar Rp. 601.903.350,- atau 99,51 %.

j. Pembinaan dan Pengolahan data Statistik pertanian.

Kegiatan ini bertujuan agar tersusunnya data statistik pertanian yang benar dan valid, serta terkoordinirnya angka tanam padi dan jagung per kecamatan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 149.109.164,- jumlah realisasi keuangan sebesar Rp. 138.684.500,- atau 93,01 %.

k. Penangkaran Bibit Unggul Perkebunan

Kegiatan ini pelaksanaannya dibatalkan karena terjadi efisiensi anggaran, hanya terealisasi sebesar Rp. 4.024.250,- untuk kegiatan CPCL.

l. Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian

Kegiatan ini bertujuan agar tersusun action plan kawasan komoditi kopi, gambir, kelapa sawir, kelapa dalam dan pala. jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 267.112.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 265.848.550,- atau 99,53 %.

m. Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida.

Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya pengujian mutu pestisida yang diduga palsu serta terpantaunya ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 39.737,500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 36,360.350,- atau 91,50 %.

n. Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan pestisida untuk stok persediaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta terlaksananya gerakan pengendalian hama tanaman pangan dan hortikultura oleh kelompok tani secara bersama-sama. Jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 162.110.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 161.368.400,- atau 99,54 %.

6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian penyuluh pertanian lapangan melalui pelatihan dan penilaian-penilaian. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 519.044.400,- dengan realisasi anggaran Rp. 509.697.157 atau 98,20 %. Program ini didukung dengan 2 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Anggaran kegiatan ini Rp. 467.878.900,- dengan realisasi anggaran Rp. 459.316.657,- atau 98,17 % , Kegiatan ini bertujuan agar terlatihnya penyuluh pertanian lapangan sehingga keahlian penyuluh terus bisa ditingkatkan, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap penyuluh, kelompok tani, BPK dan petani berprestasi/teladan tingkat kabupaten.

b. Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian/Perkebunan

Kegiatan ini bertujuan agar tersusunnya programa penyuluhan baik kabupaten maupun programa kecamatan sebagai pedoman untuk melakukan penyuluhan kepada petani/kelompok tani. Anggaran Kegiatan ini Rp. 51.165.500,- dan terealisasi Rp. 50.380.500,- atau 98,47 % .

7. Program Peningkatan Kelembagaan Petani

Program ini bertujuan untuk melegalisasi kelompok tani yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dan peningkatan kemampuan LKMA yang ada dan peningkatan kemampuan petani dalam melakukan budidaya padi melalui Sekolah lapang budidaya padi pada enam Daerah Irigasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Pagu anggaran sebesar Rp. 1.596.289.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 1.283.036.431,- atau 80,38 %. Program ini didukung dengan 6 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (LKMA)

Pagu anggaran sebesar Rp. 95.929.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 92.469.00 atau 96,39%.

b. Fasilitasi asuransi usaha tani padi, jumlah anggaran sebesar Rp. 38.830.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.964.666,- atau sebesar 95,19 persen.

c. Fasilitasi pembentukan kelompok tani berbadan hukum, jumlah anggaran sebesar Rp. 138.104.600,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 137.066.500,- atau sebesar 99,25 persen. Tujuan kegiatan ini terbentuknya kelompok tani yang memiliki legalitas hukum sebanyak 72 kelompok tani.

d. LOAN IPDMIP, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.110.540.400, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 821.613.750,-atau sebesar 73,98 persen.

- e. Penunjang LOAN IPDMIP, jumlah anggaran sebesar Rp. 70.851.200,-, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 68.757.965,- atau sebesar 97,04 persen
- f. Forum komunikasi petani petani/kontak tani, jumlah anggaran sebesar Rp. 142.033.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 126.164.550,- atau sebesar 88,83 persen.

8. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian.

Program ini bertujuan agar terdatanya kelompok tani yang melakukan pengolahan hasil pertanian baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan, terlatihnya petani pengolahan hasil untuk membuat hasil olahan pertanian yang lebih berkualitas, lebih banyak jenis olahannya serta memiliki kemasan yang bisa diterima oleh pasar modern. Pagu anggaran sebesar Rp. 343.908.748,- realisasi keuangan sebesar Rp. 331.319.956- atau 96,34 %. Program ini didukung dengan 5 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengembangan pasca panen tanaan hortikultura, jumlah anggaran sebesar Rp. 78.098.500, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 77.894.200,- atau sebesar 99,74 persen.
- b. Pengembangan jaringan pemasaran produksi perkebunan, jumlah anggaran sebesar Rp. 45.854.442,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 41.951.250,- atau sebesar 91,47 persen
- c. Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 10.560.000,- dengan realiasi keuangan sebesar Rp. 8.079.300,- atau sebesar 76,51 persen. Rendahnya realisasi keuangan karena even-event seperti Festival Langkisau, dan Festival Mandeh pelaksanaanya dibatalkan pada tahun 2019.
- d. Pengembangan pasca panen tanaman pangan, jumlah anggaran sebesar Rp. 144.185.806, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 142.978.956,- atau sebesar 99,16 persen
- e. Pengembangan pasca panen tanaman perkebunan, jumlah anggaran sebesar Rp. 65.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.416.250,- atau sebesar 92,66 persen.

9. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Pekebunan

Program ini bertujuan untuk penyediaan sarana prasaran penunjang produksi pertanian seperti tersedianya irigasi yang baik dan lancar, terbangunnya jalan usaha tani, terbangunnya embung untuk pengumpulan air irigasi. Pagu anggaran sebesar Rp. 7.475.747.991,- realisasi keuangan sebesar Rp. 5.867.807.733- atau 78,49 %. Rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan ini disebabkan karena ada dana Bantuan Keuangan khusus (BKK) yang pada tahun 2019 ini tidak bisa direalisasikan karena belum adanya pengalokasian anggaran dari propinsi ke kabupaten/kota sebesar Rp. 1.455.550.000,- sementara anggaran tersebut sudah dimasukkan kedalam aplikasi SIPKD. Program ini didukung dengan 14 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengembangan prasarana dan sarana pertanian (penunjang satker 08), jumlah anggaran sebesar Rp. 77.203.991, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.832.186,- atau sebesar 99,52 persen
- b. Pembangunan/Rehabilitasi infrastruktur pertanian, jumlah anggaran sebesar Rp. 3.830.380.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.690.791.400,- atau sebesar 96,36 persen.
- c. DAK bidang pertanian dan pendampingan, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.017.814.000, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.011.841.254,- atau sebesar 99,70 persen,
- d. Penunjang DAK bidang pertanian, jumlah anggaran sebesar Rp. 94.800.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.342.893,- atau sebesar 93,19 persen.

Kegiatan yang berasal dari dana bantuan keuangan khusus (BKK) yang tidak bisa terealisasi diantaranya : (1) Pembukaan jalan pertanian puncak baling Koto Baru Kecamatan Bayang dengan pagu Rp. 94.800.000,- (2) Pembuatan JUT Kenagarian Ngalau Gadang Limau-limau Kec. Bayang Utara dengan padu Rp. 189.700.000,- (3) Pembangunan jalan pertanian Dilan Nagari Muaro Aie Pancung Taba dengan pagu Rp. 94.800.000,- (4). Pembangunan jalan pertanian Korong Nan Ampek Kec. Koto XI Tarusan dengan pagu anggaran Rp. 94.800.000,- (5). Pembangunan jalan ruas Limau Manis Kulam Nagari Kambang- Ganting Kubang Nagri Kambang Utara Kecamatan Lengayang dengan pagu Rp. 180.200.000,- (6). Peningkatan Jalan Air Kulam Kecamatan Lengayang dengan pagu Rp. 94.800.000,- (7) JUT Rawang Indah menuju Nagari Gurun Panjang Kampung Ambacang kamba Nagari Asam Kamba Kec, Bayang dengan pagu Rp. 189.700.000,- (8). JUT Lumpur (pengerasan gorong-

gorong jembatan) Nagari Barung-barung Belantai Kec. Koto XI Tarusan dengan pagu Rp. 142.300.000,- (9). Jalan pertanian Lakitan Selatan Kec. Lengayang dengan pagu Rp. 189.700.000,- (10). JUT Rimbo Data Korong Nan Ampek Kampung Sungai Lundang Kenagarian Kampung Baru Kec. Koto XI Tarusan dengan pagu Rp. 184.750.000,-

BAB. III.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

3.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos –Pos Pelaporan Keuangan Pemda

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka mulai pada tahun 2019 ini, Laporan keuangan yang dibuat adalah berbasis akrual . Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, & relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, & politik.

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 terdiri dari:

3.1.1. Pendapatan

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan yang terjadi pada periode pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

3.1.2. Beban

Beban merupakan suatu **penurunan** nilai ekonomi yang berupa kas keluar atau aktiva berkurang. Biasanya beban dianggap sebagai **kewajiban** yang dapat menyebabkan nilai ekuitas menurun. Umumnya beban dianggap sebagai pengorbanan atau kewajiban yang sebelumnya telah terjadi.

Beban adalah suatu yang dikeluarkan atau dikorbankan dengan **tujuan** untuk dapat memperoleh pendapatan, misalnya akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi seperti beban listrik, beban penyusutan, beban sewa, beban gaji, dan lain-lain.

Beban dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Beban Perolehan Pendapatan
- b. Beban Operasi/rutin
- c. Beban operasioal lainnya
- d. Beban lainnya

3.1.3. Belanja

Belanja diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dikeluarkan dari kas daerah. Belanja yang menggunakan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja

3.1.4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dalam Neraca Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya

3.1.5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Perikanan Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Ekuitas dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- e. Ekuitas Dana Lancar
- f. Ekuitas Dana Investasi
- g. Ekuitas Dana Cadangan

3.2 . Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemda

a. Belanja

Belanja meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan Total Pagu Anggaran Rp. 25.634.340.663,00,- dan realisasi belanja daerah sampai dengan Desember 2019 adalah sebagai berikut ;

No	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)
1.	Belanja Operasi	23.300.875.833,75	21.658.897.903,00
	Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai merupakan realisasi dari Gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Sampai dengan Desember 2019 realisasi Belanja Operasi mencapai Rp. 21.658.897.903,00 dengan rincian sebagai berikut :		
	Belanja Pegawai		
	- Gaji dan Tunjangan	8.035.905.533,00	7.766.997.865,00
	- Tambahan Penghasilan PNS	2.680.698.816,00	2.264.031.800,00
	- Insentif Pemungutan Ret Daerah	00,00	00,00
	Jumlah Belanja Pegawai	10.716.604.349,00	10.031.029.665,00
	Belanja Barang dan Jasa		
	- Belanja Bahan Pakai Habis	500.106.887,75	581.959.287,00
	- Belanja Bahan/Material	118.837.900,00	134.054.950,00
	- Belanja Jasa Kantor	589.654.472,00	859.626.109,00
	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.419.196,00	92.843.798,00
	- Belanja Cetak dan Penggandaan	62.033.650,00	98.667.310,00
	- Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang /Parkir	13.857.143,00	34.184.000,00
	- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	114.200.000,00	149.474.750,00
	- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	850.000,00	900.000,00
	- Belanja Makanan dan Minuman	236.953.000,00	311.190.000,00
	- Belanja Pakaian Kerja	66.000.000,00	66.665.000,00
	- Belanja Perjalanan Dinas	898.950.096,00	835.184.308,00
	- Belanja Pemeliharaan	36.945.000,00	38.337.500,00

- Belanja Jasa Konsultasi	607.950.000,00	810.650.000,00
- Belanja Hibah Barang/Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat /pihak ketiga	6.434.071.790,00	5.987.357.226,00
- Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS		99.997.000,00
- Belanja jasa pihak ketiga	522.522.100,00	19.150.000,00
- Belanja Honorarium Non Pegawai		284.502.000,00
- Honorarium PNS	385.597.250,00	387.375.000,00
- Honorarium Non PNS	630.650.000,00	773.900.000,00
- Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	42.000.000,00	81.000.000,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	11.331.598.484,75	11.627.868.238,00

Belanja Modal

- Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	627.721.000,-	527.936.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor		11.000.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga		5.925.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.699.000,00	62.071.500,00
- Belanja Modal Pengadaan meja & kursi kerja/Rapat Pejabat	8.000.000,00	34.200.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	525.572.000,00	599.708.284,00
- Belanja Modal Pengadaan Jembatan	74.750.000,00	
- Belanja Modal Pengadaan Buku	931.000,00	
- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi		179.600.000,00
Jumlah Modal	1.252.673.000,00	1.420.440.784,00

b. Aset

Aset Lancar

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)
1.	Persediaan	1.600.516.940,00	4.762.571.565,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2018 dan 2019. Rincian saldo persediaan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	Obat-obatan	115.620.940,00	97.422.245,00
2.	Barang u/ pihak ketiga	1.482.934.000,00	4.665.149.320,00
3	ATK	148.000,00	
4	Materai	129.000,00	
5	Cetak	1.685.000,00	
	Jumlah	1.600.516.940,00	4.762.571.565

Aset Tetap

No.	Perkiraan	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)
1.	Aset Tetap	12.211.003.296,92	20.481.983.898,92
	Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp. 20.481.983.898,92 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 12.211.003.296,92 dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Tanah	1.013.254.240,00	1.605.276.614,00
	Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.605.276.614,00 . Penambahan berasal dari mutasi dari SKPD lain yaitu dari Dinas Pangan sebesar Rp. 592.022.374 yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.		
	2. Peralatan Dan Mesin	4.175.171.957,42	8.126.359.055,42
	Dalam tahun 2019 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 3.951.187.098,00 yang berasal dari belanja modal tahun 2019 sebesar Rp. 641.132.500,00, mutasi dari Dinas Pangan sebesar Rp. 1.582.583.598,00 dan hibah dari pihak ketiga yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berupa Hand Traktor Roda 2 sebanyak 50 unit senilai Rp. 1.117.050.000,00 dan Excavator sebanyak 1 unit senilai Rp. 610.421.000,00		
	3. Gedung dan bangunan	6.814.880.277,98	10.914.168.407,98
	Dalam tahun 2019 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 4.099.288.130,00 yang berasal dari belanja modal tahun 2019 dan Rp.599.708.284,00 , KDP yang telah menjadi bangunan sebesar Rp. 569.867.000 dan mutasi dari SKPD lain yaitu dari Dinas Pangan sebesar Rp. 2.929.712.846,00.		
	4. Jalan Irigasi dan Jaringan	7.273.183.596,48	7.452.783.596,48
	Dalam tahun 2019 terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 179.600.000,00 yang berasal dari belanja modal tahun 2019 yaitu belanja modal pengadaan bangunan pelengkap irigasi.		
	5. Aset Tetap Lainnya	44.660.000,00	44.660.000,00

Dalam tahun 2019 tidak terjadi mutasi tambah.

6. Akumulasi Penyusutan	7.724.198.774,95	7.724.198.774,95
--------------------------------	-------------------------	-------------------------

Dalam tahun 2018 terdapat akumulasi penyusutan sebesar Rp. **7.724.198.774,95**

2. Aset Lainnya	71.164.800,00	71.164.800,00
------------------------	----------------------	----------------------

Aset lainnya pada tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp. 71.164.800,00

C Kewajiban	1.462.585.064,50	1.455.550.000,00
--------------------	-------------------------	-------------------------

Kewajiban Tahun 2018 sebesar Rp. 1.462.585.064,50 yang berasal dari Dana BKK dari Propinsi Tahun 2018 yang belum diluncurkan sebesar Rp. 1.455.550.000,00 dan Tagihan listrik dan air tahun 2018. Tahun 2019 kewajiban sebesar Rp. 1.455.550.000,00 yang berasal dari Dana BKK dari propinsi yang masih belum terealisasi pada tahun 2019 ini.

D Ekuitas	12.420.099.972,42	23.860.170.263,92
------------------	--------------------------	--------------------------

Nilai Ekuitas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Desember 2019 sebesar **Rp. 23.860.170.263,92** dan tahun 2018 sebesar Rp. 12.420.099.972,42

BAB IV

PENUTUP

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawaban keuangan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, memuat kesimpulan-kesimpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Painan , Januari 2020
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN


Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2019 DAN 2018

No.	URAIAN	2019	2018
1	2	3	5
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
4	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
5	Kas BLUD	-	-
6	Kas BOS	-	-
7	Kas Lainnya	-	-
8	Piutang Pajak	-	-
9	Penyisihan Piutang Pajak	-	-
10	Piutang Pajak Netto	-	-
11	Piutang Retribusi	-	-
12	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-
13	Piutang Retribusi Ne	-	-
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan D	-	-
15	Penyisihan Piutang Hasil Peng	-	-
16	Piutang Hasil Pengel	-	-
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Da	-	-
18	Penyisihan Bagian Lancar Tunt	-	-
19	Bagian Lancar Tuntu	-	-
20	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
21	Penyisihan Piutang Lain-lain	-	-
22	Piutang Lain-lain PA	-	-
23	Piutang kepada Pihak Ketiga	-	-
24	Piutang Lainnya	-	-
25	Penyisihan Piutang	-	-
26	Beban Dibayar Dimuka	-	-
27	Persediaan	4.762.571.565,00	1.600.516.940,00
28	Aset Lancar Lainnya	-	-
29	Jumlah Aset Lancar	4.762.571.565,00	1.600.516.940,00
30	ASET TETAP		
31	Tanah	1.605.276.614,00	1.013.254.240,00
32	Peralatan dan Mesin	8.126.359.055,42	4.175.171.957,42
33	Gedung dan Bangunan	10.914.168.407,98	6.814.880.277,98
34	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.452.783.596,48	7.273.183.596,48
35	Aset Tetap Lainnya	44.660.000,00	44.660.000,00
36	Konstruksi dalam Pengerjaan	62.935.000,00	614.052.000,00
37	Akumulasi Penyusutan	(7.724.198.774,95)	(7.724.198.774,95)
38	Jumlah Aset Tetap	20.481.983.898,92	12.211.003.296,92
39	ASET LAINNYA	-	-
40	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-
41	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	-	-
42	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Dae	-	-
43	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
44	Aset Tidak Berwujud	-	-
45	Akumulasi Amortisasi	-	-
46	Aset Non Lancar Lainnya	-	-
47	Aset Lain-lain	71.164.800,00	71.164.800,00
48	Jumlah Aset Lainnya	71.164.800,00	71.164.800,00
49	TOTAL ASET	25.315.720.263,92	13.882.685.036,92
50		-	-
51	KEWAJIBAN	-	-
52	Kewajiban Jangka Pendek	-	-
53	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-

54	Utang Bunga Denda dan <i>Commitment F</i>	-	-
55	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
56	Utang pada Pihak Ketiga	1.455.550.000,00	1.455.550.000,00
57	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	7.035.064,50
58	Jumlah Kewajiban	1.455.550.000,00	1.462.585.064,50
59	TOTAL KEWAJIBAN	1.455.550.000,00	1.462.585.064,50
60			
61	EKUITAS		
62	Ekuitas	23.860.170.263,92	12.420.099.972,42
63	TOTAL EKUITAS	23.860.170.263,92	12.420.099.972,42
64			
65	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	25.315.720.263,92	13.882.685.036,92

Painan, 31 Desember 2019
Pengguna Anggaran


Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKPD : 2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	104.800.000,00	4.700.000,00	4,48	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	104.800.000,00	4.700.000,00	4,48	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	104.800.000,00	4.700.000,00	4,48	-
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	4.800.000,00	4.700.000,00	97,92	-
4.1.2.15.004.	Sewa Kendaraan Bermotor - LRA	4.800.000,00	4.700.000,00	97,92	-
4.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	100.000.000,00	-	-	-
4.1.2.25.001.	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA	100.000.000,00	-	-	-
5.	BELANJA	25.534.340.663,00	23.079.338.687,00	90,03	-
5.1.	BELANJA OPERASI	24.206.083.163,00	21.658.897.903,00	89,48	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	10.176.960.665,00	10.031.029.665,00	98,57	-
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.874.786.915,00	7.766.997.865,00	98,63	-
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.919.138.603,00	5.837.744.240,00	98,62	-
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	544.439.222,00	536.379.557,00	98,52	-
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	171.229.800,00	168.150.000,00	98,20	-
5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	613.258.800,00	612.420.000,00	99,86	-
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	92.047.200,00	91.045.000,00	98,91	-
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	281.485.677,00	276.427.140,00	98,20	-
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.394.627,00	33.209.600,00	99,45	-
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	92.261,00	89.327,00	96,82	-
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	170.650.255,00	163.814.185,00	96,33	-
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	12.390.353,00	11.929.692,00	96,27	-
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	37.177.117,00	35.789.124,00	96,27	-
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.297.013.750,00	2.264.031.800,00	98,56	-
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	2.297.013.750,00	2.264.031.800,00	98,56	-
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.240.000,00	-	-	-
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	240.000,00	-	-	-
5.1.1.06.025.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	5.000.000,00	-	-	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.029.122.498,00	11.627.868.238,00	82,88	-
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	634.836.946,00	581.959.287,00	91,67	-
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	204.293.014,00	190.671.750,00	93,33	-
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.289.700,00	6.876.000,00	95,45	-
5.1.2.01.004.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00	-
5.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.132,00	-	-	-
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	417.484.100,00	378.561.537,00	90,68	-
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	137.511.000,00	134.054.950,00	97,49	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.1.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	30.250.000,00	30.000.000,00	99,17	-
5.1.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	69.320.000,00	69.270.950,00	99,93	-
5.1.2.02.005.	Belanja bahan kimia	29.645.000,00	29.645.000,00	100,00	-
5.1.2.02.015.	Belanja Bahan Baku Percontohan	8.296.000,00	5.139.000,00	61,95	-
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	964.060.000,00	859.626.109,00	89,17	-
5.1.2.03.001.	Belanja telepon	3.600.000,00	381.514,00	10,60	-
5.1.2.03.002.	Belanja air	4.440.000,00	3.703.800,00	83,42	-
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	126.960.000,00	94.398.695,00	74,35	-
5.1.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.500.000,00	4.440.000,00	98,67	-
5.1.2.03.012.	Belanja jasa kebersihan kantor	128.000.000,00	127.372.100,00	99,51	-
5.1.2.03.015.	Belanja Dekorasi	15.320.000,00	13.420.000,00	87,60	-
5.1.2.03.016.	Belanja Publikasi	6.050.000,00	6.050.000,00	100,00	-
5.1.2.03.017.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	668.640.000,00	603.935.000,00	90,32	-
5.1.2.03.018.	Belanja Akomodasi	6.550.000,00	5.925.000,00	90,46	-
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120.543.950,00	92.843.798,00	77,02	-
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	31.100.000,00	19.439.650,00	62,51	-
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	69.300.000,00	68.051.798,00	98,20	-
5.1.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.143.950,00	824.250,00	26,22	-
5.1.2.05.005.	Belanja Pajak Kendraan Bermotor	17.000.000,00	4.528.100,00	26,64	-
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.556.496,00	98.667.310,00	91,74	-
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	77.383.232,00	69.880.510,00	90,30	-
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	30.173.264,00	28.786.800,00	95,40	-
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	41.184.000,00	34.184.000,00	83,00	-
5.1.2.07.002.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	39.184.000,00	32.184.000,00	82,14	-
5.1.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	178.400.000,00	149.474.750,00	83,79	-
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	178.400.000,00	149.474.750,00	83,79	-
5.1.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	900.000,00	100,00	-
5.1.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	900.000,00	900.000,00	100,00	-
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	367.845.000,00	311.190.000,00	84,60	-
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	162.882.500,00	153.410.000,00	94,18	-
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	19.800.000,00	12.605.000,00	63,66	-
5.1.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	171.412.500,00	132.800.000,00	77,47	-
5.1.2.11.007.	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	13.750.000,00	12.375.000,00	90,00	-
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	77.800.000,00	66.665.000,00	85,69	-
5.1.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	77.800.000,00	66.665.000,00	85,69	-
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	924.220.000,00	835.184.308,00	90,37	-
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	544.215.000,00	488.925.000,00	89,84	-
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	305.275.000,00	287.390.000,00	94,14	-
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	74.730.000,00	58.869.308,00	78,78	-
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	40.250.000,00	38.337.500,00	95,25	-
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.250.000,00	20.240.000,00	99,95	-

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	18.097.500,00	90,49	-
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	810.650.000,00	810.650.000,00	100,00	-
5.1.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	810.650.000,00	810.650.000,00	100,00	-
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.879.860.106,00	5.987.357.226,00	75,98	-
5.1.2.20.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.879.860.106,00	5.987.357.226,00	75,98	-
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00	99.997.000,00	100,00	-
5.1.2.23.003.	Belanja bimbingan teknis	100.000.000,00	99.997.000,00	100,00	-
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	303.680.000,00	284.502.000,00	93,68	-
5.1.2.24.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	234.300.000,00	215.122.000,00	91,81	-
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	69.380.000,00	69.380.000,00	100,00	-
5.1.2.25.	Honorarium PNS	405.925.000,00	387.375.000,00	95,43	-
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	235.700.000,00	232.400.000,00	98,60	-
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.800.000,00	9.900.000,00	91,67	-
5.1.2.25.004.	Honorarium Pengawas	22.500.000,00	21.500.000,00	95,56	-
5.1.2.25.005.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	32.400.000,00	19.050.000,00	58,80	-
5.1.2.25.026.	Honorarium Tim DED	104.525.000,00	104.525.000,00	100,00	-
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	791.400.000,00	773.900.000,00	97,79	-
5.1.2.26.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	-
5.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai	755.400.000,00	737.900.000,00	97,68	-
5.1.2.27.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	142.500.000,00	81.000.000,00	56,84	-
5.1.2.27.002.	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	142.500.000,00	81.000.000,00	56,84	-
5.2.	BELANJA MODAL	1.428.257.500,00	1.420.440.784,00	99,45	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	646.807.500,00	641.132.500,00	99,12	-
5.2.2.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	528.536.000,00	527.936.000,00	99,89	-
5.2.2.04.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	528.536.000,00	527.936.000,00	99,89	-
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
5.2.2.14.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
5.2.2.15.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	5.925.000,00	98,75	-
5.2.2.15.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	5.925.000,00	98,75	-
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	62.521.500,00	62.071.500,00	99,28	-
5.2.2.16.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.553.300,00	16.353.300,00	98,79	-
5.2.2.16.007.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	45.968.200,00	45.718.200,00	99,46	-
5.2.2.17.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	38.750.000,00	34.200.000,00	88,26	-
5.2.2.17.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-
5.2.2.17.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	8.000.000,00	7.200.000,00	90,00	-
5.2.2.17.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	20.750.000,00	17.000.000,00	81,93	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	601.550.000,00	599.708.284,00	99,69	-
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	601.550.000,00	599.708.284,00	99,69	-
5.2.3.01.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	601.550.000,00	599.708.284,00	99,69	-

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5	6
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	179.900.000,00	179.600.000,00	99,83	-
5.2.4.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	179.900.000,00	179.600.000,00	99,83	-
5.2.4.03.006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	179.900.000,00	179.600.000,00	99,83	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(25.529.540.663,00)	(23.074.638.687,00)	90,38	-

Painan, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran


Ir. NUZIRWAN.N. MT

NIP. 19670826 199803 1 001.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 DAN 2018

(Dalam rupiah)

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.. -LO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN				
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO	10.031.029.665,00	0,00	10.031.029.665,00	100,00
Beban Pegawai - LO	7.766.997.865,00	0,00	7.766.997.865,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	5.837.744.240,00	0,00	5.837.744.240,00	100,00
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	536.379.557,00	0,00	536.379.557,00	100,00
Tunjangan Keluarga - LO	168.150.000,00	0,00	168.150.000,00	100,00
Tunjangan Jabatan - LO	612.420.000,00	0,00	612.420.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional - LO	91.045.000,00	0,00	91.045.000,00	100,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	276.427.140,00	0,00	276.427.140,00	100,00
Tunjangan Beras - LO	33.209.600,00	0,00	33.209.600,00	100,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	89.327,00	0,00	89.327,00	100,00
Pembulatan Gaji - LO	163.814.185,00	0,00	163.814.185,00	100,00
Iuran Jaminan Kesehatan - LO	11.929.692,00	0,00	11.929.692,00	100,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	35.789.124,00	0,00	35.789.124,00	100,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM)	2.264.031.800,00	0,00	2.264.031.800,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	2.264.031.800,00	0,00	2.264.031.800,00	100,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja - LO	11.627.868.238,00	0,00	11.627.868.238,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	581.959.287,00	0,00	581.959.287,00	100,00
Beban Bahan Pakai Habis	190.671.750,00	0,00	190.671.750,00	100,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	6.876.000,00	0,00	6.876.000,00	100,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	100,00
Beban Persediaan perangkat, materi dan benda pos lainnya	378.561.537,00	0,00	378.561.537,00	100,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	134.054.950,00	0,00	134.054.950,00	100,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00
Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	69.270.950,00	0,00	69.270.950,00	100,00
Beban Persediaan bahan obat-obatan	29.645.000,00	0,00	29.645.000,00	100,00
Beban Persediaan bahan kimia	5.139.000,00	0,00	5.139.000,00	100,00
Beban Persediaan bahan Baku Percontohan	859.626.109,00	0,00	859.626.109,00	100,00
Beban Jasa Kantor	381.514,00	0,00	381.514,00	100,00
Beban Jasa telepon	3.703.800,00	0,00	3.703.800,00	100,00
Beban Jasa listrik	94.398.695,00	0,00	94.398.695,00	100,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	100,00
Beban Jasa Uang Saku dan Penggantian Transportasi	603.935.000,00	0,00	603.935.000,00	100,00
Beban Jasa Akomodasi	5.925.000,00	0,00	5.925.000,00	100,00
Beban Jasa Dekorasi	13.420.000,00	0,00	13.420.000,00	100,00
Beban Jasa Kebersihan Kantor	127.372.100,00	0,00	127.372.100,00	100,00
Beban Jasa Publikasi	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	100,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	92.843.798,00	0,00	92.843.798,00	100,00
Beban Jasa Service	19.439.650,00	0,00	19.439.650,00	100,00
Beban Penggantian Suku Cadang	68.051.798,00	0,00	68.051.798,00	100,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	824.250,00	0,00	824.250,00	100,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	4.528.100,00	0,00	4.528.100,00	100,00
Beban Cetak dan Penggandaan	98.667.310,00	0,00	98.667.310,00	100,00

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Cetak	69.880.510,00	0,00	69.880.510,00	100,00
Beban Penggandaan	28.786.800,00	0,00	28.786.800,00	100,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	34.184.000,00	0,00	34.184.000,00	100,00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	32.184.000,00	0,00	32.184.000,00	100,00
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	149.474.750,00	0,00	149.474.750,00	100,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	149.474.750,00	0,00	149.474.750,00	100,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban sewa meja kursi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman	311.190.000,00	0,00	311.190.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman rapat	153.410.000,00	0,00	153.410.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman tamu	12.605.000,00	0,00	12.605.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman pelatihan	132.800.000,00	0,00	132.800.000,00	100,00
Beban makanan dan minuman peserta	12.375.000,00	0,00	12.375.000,00	100,00
Belanja Pakaian Kerja	66.665.000,00	0,00	66.665.000,00	100,00
Beban pakaian kerja lapangan	66.665.000,00	0,00	66.665.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	835.184.308,00	0,00	835.184.308,00	100,00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	488.925.000,00	0,00	488.925.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi	287.390.000,00	0,00	287.390.000,00	100,00
Beban perjalanan dinas Luar Daerah Luar Propinsi	58.869.308,00	0,00	58.869.308,00	100,00
Beban Pemeliharaan	38.337.500,00	0,00	38.337.500,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.240.000,00	0,00	20.240.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.097.500,00	0,00	18.097.500,00	100,00
Beban Jasa Konsultasi	810.650.000,00	0,00	810.650.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	810.650.000,00	0,00	810.650.000,00	100,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.987.357.226,00	0,00	5.987.357.226,00	100,00
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.987.357.226,00	0,00	5.987.357.226,00	100,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	99.997.000,00	0,00	99.997.000,00	100,00
Beban bimbingan teknis	99.997.000,00	0,00	99.997.000,00	100,00
Honorarium PNS	387.375.000,00	0,00	387.375.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	232.400.000,00	0,00	232.400.000,00	100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	100,00
Honorarium Pengawas	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	100,00
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	19.050.000,00	0,00	19.050.000,00	100,00
Honorarium Tim DED	104.525.000,00	0,00	104.525.000,00	100,00
Honorarium Non PNS	773.900.000,00	0,00	773.900.000,00	100,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	737.900.000,00	0,00	737.900.000,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	100,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	100,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	100,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	284.502.000,00	0,00	284.502.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	69.380.000,00	0,00	69.380.000,00	100,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	215.122.000,00	0,00	215.122.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN	21.658.897.903,00	0,00	21.658.897.903,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(21.654.197.903,00)	0,00	(21.654.197.903,00)	100,00

Painan, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran

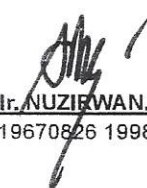

Ir. NUZIRWAN.N. MT
Nip.19670626 199803 1 001.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
2.00.03.01. – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2019 DAN 2017

URAIAN	2019	2017
EKUITAS AWAL	12.420.099.972,04	12.420.099.972,04
RK PPKD	23.074.938.687,00	0.00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	35.495.038.659,04	12.420.099.972,04

Painan, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran


Ir. NUZIRWAN.N. MT

NIP. 19670826 199803 1 001.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
DAFTAR RINCIAN HUTANG PER 31 DESEMBER 2019

No	Uraian	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Tanggal Kontrak	Penyedia	Realisasi	
						Real (%)	Keuangan (Rp)
1	Pembukaan Jalan Pertanian Puncak Baling Koto Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	521.3/35/SPK-PSP/Ditambahorhun-PS/2018	94,800,000	24 Agustus 2018	CV. NADIN JAYA UTAMA	100	0
2	Pembukaan Jalan Pertanian Dihan Pancing Tebu Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	521.3/36/SPK-PSP/Ditambahorhun-PS/2018	94,800,000	24 Agustus 2018	CV. AGUNG KARYA	100	0
3	Pembukaan Jalan Usaha Tani Kembangan Ngalan Gadang Limau-limau Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	521.3/37/SPK-PSP/Ditambahorhun-PS/2018	189,700,000	24 Agustus 2018	CV. NADIN JAYA UTAMA	100	0
4	Pembukaan Jalan Pertanian Laktian Selatan Kecamatan Langsyang Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	521.3/44/SPK-PSP/Ditambahorhun-PS/2018	189,700,000	31 Agustus 2018	CV. AGUNG KARYA	100	0
5	Jalan Usaha Tani Rimbo Duta, Korong Nani Ampuk Kampung Sungai Loundang Kembangan Kampung Baru kec. Koto XI Terusan Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	521.3/39/SPK-PSP/Ditambahorhun-PS/2018	184,750,000	28 Agustus 2019	CV. ZEIN KARYA	100	0
6	Jalan Usaha Tani Rawang Indah Menuju Negeri (Jalan Panjang Kampung Ambacang Kambe Negeri Asau Kambe Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	521.3/38/SPK-PSP/Ditambahorhun-PS/2018	189,700,000	24 Agustus 2018	CV. ZEIN KARYA	100	0
7	Pemungutan Jalan Pertanian Korong Nani Ampuk Kecamatan Koto XI Terusan Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	521.3/40/SPK-PSP/Ditambahorhun-PS/2018	94,800,000	28 Agustus 2019	CV. DUA SAUDARA	100	0
8	Jalan Usaha Tani Lumpir (pengersan gorong-gorong jembatan), nguri barang-barang belandi Kecamatan Koto XI Terusan Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	521.3/41/SPK-PSP/Ditambahorhun-PS/2018	142,300,000	28 Agustus 2019	CV. FARIZ DUTA KONSTRUKSI	100	0
9	Peningkatan Jalan Air Kulan Kecamatan Langsyang Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	521.3/42/SPK-PSP/Ditambahorhun-PS/2018	94,800,000	28 Agustus 2019	CV. BUNGSU KARYA PRATAMA	100	0
10	Pembangunan Jalan Rusak Limau Manik Kulan Negeri (Kembang-Genting Kubang Negeri Kembang Ula Kecamatan Langsyang Kabupaten Pesisir Selatan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018	521.3/43/SPK-PSP/Ditambahorhun-PS/2018	180,200,000	31 Agustus 2018	CV. PALAPA NUSA SARANA	100	0
Jumlah			1,455,550,000				0

Palmari, 31 Desember 2019
Kepala Dinas


Ir. Khusriyati N. MT
NIP. 19970826 199803 1 001